

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah satu kunci perekonomian yang berperan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Menurut Mahiroh (2019), pariwisata menjadi penggerak utama yang mampu menghubungkan dinamika pembangunan lintas sektor, meskipun sifatnya yang kompleks dan fragmented sering kali menyulitkan untuk diukur secara pasti. Pitana dan Diarta (2009) menegaskan bahwa pariwisata berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dunia, menggerakkan hampir 700 juta orang, dan diproyeksikan terus berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas serta kesejahteraan masyarakat global. Dalam sektor pembangunan, pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menimbulkan perubahan sosial yang dapat menggeser peran para aktor di dalamnya. Hal ini menghadirkan peluang bagi sebagian pihak untuk memperoleh keuntungan, sekaligus risiko kerugian bagi pihak lainnya.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Siaran Pers (2024) pariwisata tetap menjadi salah satu motor penggerak pembangunan karena memiliki kemampuan untuk membuka peluang aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat integrasi perekonomian pada skala nasional, regional, maupun global. Selain itu, pariwisata berpotensi menjadi strategi penanggulangan kemiskinan, mengingat kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kondisi alam dan geografi, faktor sosial budaya, serta sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi pariwisata merupakan strategi penting dalam upaya pengurangan kemiskinan. Keterlibatan ini tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan publik yang berpihak serta inisiatif masyarakat dalam

mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki. Ashari et al. (2015) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan secara menyeluruh dalam proses pembangunan yang berangkat dari kondisi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan keterlibatan tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan akan meningkat, disertai tumbuhnya rasa memiliki dan kesadaran untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah saat ini mendorong pembangunan daerah melalui sektor pariwisata berbasis kearifan lokal (*local wisdom*), dengan menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan nasional Indonesia.

Menurut laporan *United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2020)*, jumlah kedatangan wisatawan internasional pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar 74%. Kondisi ini mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan global lebih dari 1,3 triliun dolar AS serta mengancam keberlangsungan lebih dari 100 juta lapangan kerja di sektor pariwisata. Krisis akibat pandemi COVID-19 tidak hanya mengganggu perekonomian negara-negara yang bergantung pada pariwisata, tetapi juga mengungkapkan kerentanan mendasar sektor ini. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan mengadopsi perspektif *green tourism*, yaitu pengelolaan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi.

Tren *green tourism* muncul sebagai jawaban atas meningkatnya isu global mengenai perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kebutuhan akan wisata berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada aktivitas wisata yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, serta mampu mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut sangat relevan diterapkan di Pantai Tirang, Semarang, yang saat ini menghadapi persoalan nyata berupa abrasi pantai, berkurangnya vegetasi mangrove, dan tekanan aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem pesisir. Penerapan tata kelola wisata berbasis *green tourism* tidak hanya berfungsi untuk menarik wisatawan, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, membangun kesadaran konservasi, serta

menumbuhkan keterlibatan masyarakat sekitar agar dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam. Analisis tata kelola wisata dalam perspektif *green tourism* di Pantai Tirang menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik pariwisata berkelanjutan dapat dijalankan secara realistis sebagai respon atas tantangan lingkungan sekaligus sebagai sarana meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat.

Menurut *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* bahwa Penerapan *green tourism*, memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8). Melalui tata kelola wisata berbasis lingkungan, aktivitas pariwisata di Pantai Tirang dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, praktik *green tourism* di Pantai Tirang mendukung agenda penanganan perubahan iklim dengan mendorong aktivitas wisata rendah karbon, pemanfaatan energi terbarukan, serta konservasi ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai penyerap karbon (*blue carbon*), sehingga dapat berperan dalam mitigasi abrasi dan kenaikan muka air laut yang menjadi ancaman nyata di kawasan tersebut.

Tata kelola wisata berbasis *green tourism* di kawasan ini juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut dan darat dengan menjaga habitat penting seperti mangrove, terumbu karang, serta vegetasi pesisir, yang tidak hanya menopang keanekaragaman hayati, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung alami dari dampak perubahan iklim. Praktik pariwisata berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada aspek konservasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Tabel 1. 1 Kontribusi PDB 2019-2024

Tahun	Kontribusi PDB (%)
2019	4,97
2020	2,23
2021	2,30
2022	3,72

Tahun	Kontribusi PDB (%)
2023	3,9
2024	4

Sumber: Website Kementerian Pariwisata RI – Kontribusi PDB 2019-2024

Berdasarkan dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2024), perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Indonesia pada periode 2020-2024 memperlihatkan dinamika yang erat kaitannyadengan dampak pandemik COVID-19 serta proses pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini menurun drastis menjadi 2,23 persen dari 4,97 persen pada tahun 2019 akibat kebijakan pembatas mobilitas, penutupan destinasi wisata, serta penurunan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara. Kondisi tersebut menggambarkan betapa rentannya sektor pariwisata terhadap gangguan eksternal berskala global. Meskipun tahun 2021 masih diwarnai oleh ketidakpastian, terjadi sedikit peningkatan kontribusi menjadi 2,30 persen, menunjukkan awal dari proses adaptasi dan penyesuain terhadap kondisi pandemik, termasuk penerapan protocol Kesehatan dan digitalisasi layanan wisata.

Memasuki tahun 2023, sektor pariwisata mulai memperlihatkan pemulihan yang lebih nyata seiring dengan pelonggaran kebijakan perjalanan internasional dan meningkatkan mobilitas masyarakat di dalam negara. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional meningkat secara bertahap hingga mecapai 4 persen, mendekati kondisi pra-pandemi. Kenaikan tersebut mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, seperti penguatan destinasi super prioritas, promosi pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, sektor pariwisata kembali berperan strategi sebagai salah satu motor penggerak pertuymbuhan ekonomi nasional dan pendorong kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekjonomi lokal.

Pariwisata berkembang seiring dengan dorongan alami manusia untuk menjelajahi hal-hal baru, menemukan wilayah yang belum dikenal, mencari perubahan suasana, atau memperoleh pengalaman perjalanan yang berbeda (Nieamah, 2014). Pandangan ini sejalan dengan pendapat McIntosh (1995:10) dalam Wardhanis dan Valeriani (2016), yang menjelaskan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan layanan dalam industri yang kompleks, mencakup penyediaan perjalanan, transportasi, akomodasi, resort, pusat perbelanjaan, hiburan, serta berbagai bentuk layanan perhotelan lainnya yang ditujukan bagi individu maupun kelompok yang melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin. Kegiatan tersebut muncul sebagai wujud dari kebutuhan setiap orang dan negara, serta mencerminkan adanya interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha di bidang pariwisata.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka regulasi untuk mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang memberikan standar mengenai pengelolaan destinasi wisata ramah lingkungan, memperhatikan aspek sosial-budaya, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Regulasi ini lebih menekankan pada penyusunan pedoman (guidelines) dan kriteria umum yang perlu diadopsi oleh daerah tanpa menetapkan kewajiban dengan sanksi tegas apabila tidak dilaksanakan, sehingga dapat dikatakan lebih bersifat arahan normatif daripada instrumen hukum yang mengikat.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015–2025. Regulasi ini menjadi pedoman dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, dengan tujuan menjadikan Semarang sebagai destinasi yang mampu bersaing sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Adanya regulasi ini penting karena memberikan legitimasi bagi

upaya pengembangan wisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan semangat *green tourism* yang menekankan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan wisata dengan upaya pelestarian ekosistem serta peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, Perda ini dapat dilihat sebagai kerangka kebijakan daerah yang berpotensi menjadi landasan penguatan tata kelola wisata berbasis *green tourism* di Pantai Tirang.

Kebijakan nasional tersebut baru diadopsi secara parsial melalui program konservasi mangrove, kegiatan pembersihan pantai, serta pemberdayaan kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang banyak digerakkan oleh aktor lokal, seperti komunitas masyarakat pesisir, organisasi non-pemerintah, dan perguruan tinggi, misalnya Universitas Negeri Semarang yang melaksanakan penanaman mangrove serta edukasi lingkungan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memang telah berperan dalam menata aksesibilitas wisata dan infrastruktur pendukung, namun integrasi prinsip *green tourism* belum sepenuhnya menjadi kebijakan wajib dalam tata kelola resmi destinasi.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik *green tourism* di Pantai Tirang masih bersifat voluntary karena adopsinya dilakukan atas dasar kesadaran komunitas, nilai ekologis, serta partisipasi sosial, bukan karena adanya kewajiban hukum melalui perangkat regulasi lokal seperti peraturan daerah atau peraturan wali kota. Kelemahan dari pendekatan voluntary adalah ketidakpastian dalam konsistensi dan keberlanjutan program, karena kegiatan konservasi berpotensi berhenti apabila partisipasi masyarakat menurun atau dukungan pendanaan eksternal berkurang, sementara tanpa regulasi yang jelas sulit memastikan adanya standar baku dalam pengelolaan wisata berkelanjutan sehingga potensi konflik pemanfaatan ruang pesisir, degradasi lingkungan, maupun eksploitasi ekonomi tetap tinggi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kerangka kebijakan nasional, tetapi praktik di tingkat lokal masih memerlukan penguatan instrumen tata kelola agar lebih terarah dan berkesinambungan.

Pantai Tirang di Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian penulis, karena kawasan ini merepresentasikan potensi wisata berbasis lingkungan yang selaras dengan prinsip *green tourism*. Ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekologis sebagai penahan abrasi dan habitat biota pesisir, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata alam yang menonjolkan fungsi konservasi. Keberadaan komunitas nelayan tradisional di sekitar pantai turut memperkaya potensi wisata berbasis budaya lokal, sementara panorama laut yang relatif masih alami menjadikan kawasan ini memiliki nilai strategis sebagai destinasi wisata berbasis ekologi.

Pantai Tirang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang cukup serius berdasarkan hasil observasi awal peneliti, antara lain abrasi garis pantai, akumulasi sampah laut, serta kerusakan ekosistem pesisir akibat tingginya intensitas aktivitas manusia. Salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut adalah Pantai Tirang menerima aliran air dari berbagai sumber, terutama dari Sungai Silandak yang bermuara di sekitar kawasan pantai. Aliran sungai ini membawa material dari wilayah hulu, termasuk limbah rumah tangga dan sampah plastik, yang kemudian terakumulasi di sepanjang garis pantai, khususnya pada musim hujan ketika debit air sungai meningkat. Penumpukan sampah tersebut tidak hanya mengganggu estetika kawasan wisata, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan pantai dan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Di sisi lain, tata kelola kawasan wisata Pantai Tirang belum berjalan secara optimal karena pengelolaan masih didominasi oleh inisiatif komunitas lokal dan kelompok sadar wisata (pokdarwis), serta belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan pariwisata daerah. Kondisi tersebut menjadikan Pantai Tirang relevan untuk dikaji dalam perspektif *green tourism*, mengingat konsep ini menekankan pentingnya kelestarian lingkungan sebagai prasyarat utama dalam mendorong peningkatan kesadaran konservasi, penguatan ekonomi lokal melalui aktivitas wisata berkelanjutan, serta perbaikan tata kelola destinasi wisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Pemilihan lokasi penelitian di Pantai Tirang, karena terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara kerangka kebijakan normatif dan praktik pengelolaan di

lapangan dalam upaya mewujudkan *green tourism*. Secara normatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang memberikan arahan umum mengenai pengelolaan destinasi pariwisata dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Semarang juga telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015–2025 sebagai pedoman pembangunan sektor pariwisata daerah. Kerangka kebijakan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi di Pantai Tirang. Realitas berdasarkan observasi penulis di lapangan memperlihatkan bahwa berbagai inisiatif konservasi, seperti penanaman mangrove dan kegiatan pembersihan pantai, masih didominasi oleh program bersifat proyek maupun kegiatan sukarela yang dipelopori oleh perguruan tinggi, komunitas, maupun kelompok masyarakat sehingga keberlanjutannya masih rentan terhadap keterbatasan sumber daya.

Pada aspek kelembagaan, tata kelola pariwisata di Pantai Tirang masih menunjukkan fragmentasi antaraktor, di mana koordinasi lintas sektor belum berjalan secara optimal sehingga integrasi perencanaan, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan belum terwujud secara konsisten. Pada aspek konservasi, tingkat kesadaran terhadap pelestarian lingkungan baik masyarakat lokal maupun wisatawan relatif masih rendah, yang tercermin dari praktik pembuangan sampah sembarangan serta rendahnya kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir. Pada aspek ekonomi, partisipasi masyarakat lokal, khususnya nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), belum terintegrasi secara optimal dalam rantai nilai pariwisata sehingga potensi manfaat ekonomi dari pengembangan *green tourism* belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Pada aspek *green tourism*, meskipun telah dilakukan upaya rehabilitasi mangrove, hasil pemantauan menunjukkan bahwa tekanan lingkungan berupa abrasi dan penumpukan sampah laut masih berlangsung, yang menandakan perlunya intervensi sistematis.

Kondisi ini menandakan adanya potensi *greenwashing*, yakni penggunaan istilah *green tourism* sebatas sebagai retorika promosi tanpa disertai standar implementasi, mekanisme sertifikasi, dan pengawasan yang kredibel. Adanya kesenjangan yang cukup besar antara konsep *green tourism yang ideal*, yakni pariwisata yang menekankan keterjagaan lingkungan sebagai dasar bagi tercapainya manfaat sosial dan ekonomi, dengan realitas implementasi di Pantai Tirang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis tata kelola wisata Pantai Tirang dalam perspektif *green tourism*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis guna menjembatani kesenjangan antara norma ideal dan realitas empiris.

Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji sejauh mana tata kelola yang dijalankan mampu mengintegrasikan prinsip konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi secara seimbang. Bramwell dan Lane (1993) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan, termasuk di dalamnya konsep *green tourism*, dipandang sebagai suatu proses yang menekankan pada kesinambungan ekologis dan sosial yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Pendekatan ini sangat relevan diterapkan di Pantai Tirang, mengingat pengembangan pariwisata yang tidak dikelola dengan prinsip ramah lingkungan justru berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, *green tourism* memiliki nilai strategis sebagai solusi agar aktivitas wisata tidak hanya menghindari kerusakan lingkungan, tetapi juga memperkuat konservasi melalui rehabilitasi mangrove, pengendalian abrasi, dan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Dari perspektif sosial, penerapan *green tourism* juga berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Weaver (2006) menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menjaga dan memanfaatkan lingkungannya.

Dalam membangun partisipasi ekonomi, tata kelola wisata berbasis lingkungan jika dijalankan secara optimal dapat membuka peluang lebih luas bagi nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro kecil menengah untuk berpartisipasi

dalam rantai ekonomi pariwisata secara berkelanjutan sehingga manfaat pariwisata tidak terpusat pada pihak tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki nilai akademis karena berkontribusi memperkaya kajian tata kelola pariwisata dalam perspektif *green tourism*, serta nilai praktis berupa rekomendasi kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat yang relevan untuk diterapkan di Pantai Tirang.

Adanya kerumitan koordinasi antaraktor dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Tirang juga berkaitan dengan persoalan kepemilikan dan penguasaan lahan di sekitar kawasan pesisir. Status lahan di kawasan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah satu lembaga atau otoritas tertentu, sehingga melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat lokal, pengelola wisata, serta instansi yang memiliki kewenangan terhadap wilayah pesisir. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan wisata menjadi lebih kompleks karena setiap aktor memiliki kewenangan, kepentingan, dan tanggung jawab yang berbeda. Situasi tersebut menuntut adanya koordinasi yang jelas dan terarah agar kebijakan pengelolaan wisata dapat berjalan secara konsisten dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Apabila koordinasi antaraktor belum berjalan secara optimal, maka tata kelola wisata berpotensi mengalami hambatan, terutama dalam mengintegrasikan pengelolaan lingkungan, kegiatan wisata, serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi berbasis *green tourism*.

Pemilihan Pantai Tirang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya kondisi empiris yang menunjukkan bahwa pengembangan kawasan wisata tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola pariwisata berbasis lingkungan. Meskipun secara normatif pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, implementasinya di tingkat lokal belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Di Pantai Tirang, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan, seperti penanaman mangrove dan kegiatan pembersihan pantai, masih banyak bergantung pada inisiatif komunitas, perguruan tinggi, maupun kelompok masyarakat yang bersifat insidental. Selain itu, koordinasi antaraktor dalam pengelolaan kawasan wisata

masih menunjukkan keterbatasan integrasi sehingga perencanaan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata belum berjalan secara terpadu.

Pemilihan Pantai Tirang dalam penelitian ini juga didasarkan pada keberadaan kawasan konservasi mangrove yang menjadi salah satu fokus pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir tersebut. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak telah mendorong upaya rehabilitasi dan penanaman mangrove sebagai bagian dari pendekatan *green tourism*, yaitu pengembangan pariwisata yang menekankan pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan secara bertahap tidak hanya berfungsi untuk mengurangi abrasi dan menjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga secara alami membentuk daratan baru di kawasan pesisir. Perubahan kondisi lingkungan tersebut kemudian membuka peluang munculnya potensi kawasan wisata berbasis alam yang memadukan fungsi konservasi dan aktivitas pariwisata. Oleh karena itu, Pantai Tirang menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan dinamika antara upaya konservasi lingkungan melalui penanaman mangrove dengan berkembangnya potensi pariwisata yang berbasis pada prinsip *green tourism*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan oleh penulis, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian wisatawan terhadap tata kelola wisata di Pantai Tirang, Semarang?
2. Bagaimana penilaian wisatawan terhadap penerapan konsep *green tourism* di Pantai Tirang, Semarang?
3. Bagaimana penilaian kesadaran konservasi lingkungan bagi wisatawan di Pantai Tirang, Semarang?

4. Bagaimana partisipasi ekonomi masyarakat lokal dalam kegiatan wisata Pantai Tirang berdasarkan persepsi wisatawan?

1.3 Hipotesis Penelitian

Variabel Independen (X) : Tata Kelola Wisata dalam Perspektif Green Tourism

Variabel Dependen (Y) : Kesadaran Konservasi (Y1)
Partisipasi Ekonomi Masyarakat (Y2)

H01 : Tata kelola wisata di Pantai Tirang belum berjalan dengan baik berdasarkan penilaian wisatawan.

H11 : Tata kelola wisata di Pantai Tirang sudah berjalan dengan baik berdasarkan penilaian wisatawan.

H02 : Penerapan konsep green tourism di Pantai Tirang belum terlaksana dengan baik berdasarkan penilaian wisatawan.

H12 : Penerapan konsep green tourism di Pantai Tirang telah terlaksana dengan baik berdasarkan penilaian wisatawan.

H03 : Kesadaran konservasi lingkungan wisatawan di Pantai Tirang masih rendah.

H13 : Kesadaran konservasi lingkungan wisatawan di Pantai Tirang sudah baik.

H04 : Partisipasi ekonomi masyarakat lokal dalam kegiatan wisata Pantai Tirang

masih rendah.

H14 : Partisipasi ekonomi masyarakat lokal dalam kegiatan wisata Pantai Tirang sudah baik.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan wisata di Pantai Tirang, Semarang. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penilaian wisatawan terhadap tata kelola wisata di Pantai Tirang, Semarang.
2. Untuk mengetahui penilaian wisatawan terhadap penerapan konsep green tourism di Pantai Tirang, Semarang.
3. Untuk mengetahui tingkat kesadaran konservasi lingkungan wisatawan di Pantai Tirang, Semarang.
4. Untuk mengetahui partisipasi ekonomi masyarakat lokal dalam kegiatan wisata Pantai Tirang berdasarkan persepsi wisatawan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata berbasis lingkungan atau *green tourism*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengelolaan wisata berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata.

1.5.2 Manfaat Akademis

1. Menambah referensi studi pada bidang ilmu pemerintahan/studi tata kelola, lingkungan, dan pariwisata, terutama pembahasan implementasi *green tourism* di Indonesia pada kawasan pesisir.
2. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya untuk penelitian serupa pada destinasi pesisir lain, terutama penelitian berbasis persepsi wisatawan dan indikator terukur.

1.5.3 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola wisata serta pengembangan destinasi wisata berbasis konsep *green tourism* di Pantai Tirang, Semarang.

b. Bagi Pengelola Wisata

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola wisata Pantai Tirang dalam meningkatkan pengelolaan destinasi wisata, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi wisata.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

1.5.4 Manfaat Untuk Kebijakan Masa yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan mendukung penyusunan kebijakan publik yang dapat menyediakan dasar perumusan kebijakan pariwisata pesisir yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan sekaligus inklusif dalam melibatkan masyarakat (berbasis data lapangan/persepsi wisatawan).

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama Ganjar Ndaru Ikhtiagung (2019) melalui buku *Green Tourism Marketing for Sustainable Development* membahas secara komprehensif konsep green tourism dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini tidak hanya menjelaskan green tourism sebagai pendekatan pariwisata ramah lingkungan, tetapi juga menguraikan keterkaitannya dengan pengelolaan hutan mangrove, strategi pemasaran pariwisata hijau (*green tourism marketing*), serta prinsip *sustainable development*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan (*action research*) yang bersifat reflektif dan kolaboratif, di mana proses penelitian dilakukan melalui keterlibatan langsung para pemangku kepentingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan wisata berbasis green tourism tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab tunggal pemerintah daerah. Keberhasilan pariwisata berkelanjutan justru sangat bergantung pada pemetaan dan pelibatan aktor pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Pentahelix berfungsi sebagai kerangka kolaboratif yang memastikan setiap pihak berkontribusi sesuai perannya, sehingga mampu mempercepat tercapainya destinasi wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penelitian kedua, Turker et al. (2023) dalam buku *Pariwisata Nusantara: Ketahanan dan Keberlanjutan dalam Pendekatan Green Tourism* menyoroti bagaimana prinsip green tourism dapat digunakan sebagai pendekatan strategis untuk membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan sekaligus tangguh menghadapi berbagai krisis. Fokus utama kajian ini meliputi pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta tata kelola pariwisata yang menekankan kolaborasi pentahelix. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif yang didukung oleh analisis literatur, observasi lapangan, serta telaah kebijakan pariwisata. Selain itu, digunakan pula metode studi kasus untuk menggambarkan penerapan green tourism di berbagai wilayah di Indonesia, seperti desa wisata, kawasan pesisir, dan kawasan konservasi budaya. Analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, serta model pengembangan pariwisata hijau di Nusantara, dan pada beberapa bagian digunakan pendekatan partisipatif dengan menyoroti peran masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan green tourism mampu memperkuat ketahanan destinasi wisata, menjaga kelestarian ekosistem, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Keberhasilan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pengelolaan destinasi.

Penelitian ketiga Juanna et al. (2023) melalui buku *Sustainable Tourist Management: Mengatasi Sumber Daya dan Kapasitas Terbatas* membahas strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, infrastruktur, serta kapasitas kelembagaan. Kajian ini menekankan bahwa destinasi wisata tetap dapat berkembang tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan, meskipun menghadapi tekanan kunjungan yang tinggi dan keterbatasan fasilitas serta sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kasus di sejumlah destinasi wisata, termasuk desa wisata, kawasan alam, dan situs budaya. Selain itu, dilakukan analisis dokumen terhadap kebijakan pemerintah, data pariwisata daerah, serta laporan pengelolaan destinasi, dan dilengkapi dengan wawancara mendalam bersama pengelola wisata, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Pendekatan konseptual yang digunakan mencakup *carrying capacity*, *community-based tourism*, serta *sustainable destination management*. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di daerah dengan keterbatasan sangat ditentukan oleh optimalisasi kapasitas lokal melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, penguatan kebijakan daya dukung lingkungan seperti pembatasan jumlah kunjungan dan zonasi ruang, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Buku ini menyimpulkan bahwa

destinasi yang menerapkan manajemen partisipatif dan adaptif lebih mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi lokal dibandingkan destinasi yang hanya berfokus pada pembangunan fisik.

Penelitian keempat berjudul “Penerapan Konsep *Green Tourism* dalam Pengembangan Pantai Kelan Tuban sebagai Daya Tarik Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Badung” yang ditulis oleh Putu Agus Prayogi, I Wayan Kartimin, dan I Made Hedy Wartana ini diterbitkan pada tahun 2022 dalam *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies (JoTIS)*. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Pantai Kelan Tuban, Badung, Bali, yang mulai dikelola secara resmi sejak 9 Oktober 2020 oleh Desa Adat Kelan melalui Pokdarwis. Meskipun memiliki potensi alam berupa pasir putih, panorama sunset, serta keunikan aktivitas pesawat lepas landas dan mendarat dari jarak dekat, pengembangannya dinilai belum optimal akibat keterbatasan fasilitas, aksesibilitas yang perlu perbaikan, promosi yang belum maksimal, serta belum terintegrasinya peran para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi wisata Pantai Kelan, menganalisis peran stakeholder, serta merumuskan strategi pengembangan berbasis green tourism untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Landasan teoretis yang digunakan meliputi konsep 4A (*attraction, accessibility, amenity, ancillary*), teori stakeholder, konsep green tourism yang menekankan konservasi lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal, serta prinsip pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan *SWOT* untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama Pantai Kelan terletak pada potensi alam yang masih asri, lokasi strategis dekat Bandara Ngurah Rai, serta dukungan masyarakat adat. Kelemahannya meliputi fasilitas umum yang terbatas dan pengelolaan yang belum maksimal. Peluang muncul dari meningkatnya minat wisata alam, sedangkan ancaman berasal dari persaingan destinasi lain dan risiko kerusakan lingkungan.

Peran stakeholder dinilai krusial: pemerintah dan Desa Adat berfungsi dalam pengawasan dan kebijakan, pengusaha mendukung melalui usaha kuliner dan penciptaan lapangan kerja, masyarakat menjaga kebersihan dan keamanan, serta Pokdarwis mengelola operasional dan promosi. Strategi pengembangan yang dirumuskan mencakup optimalisasi potensi alam, perbaikan akses dan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan promosi berbasis teknologi. Seluruh strategi diarahkan pada penerapan prinsip green tourism guna memastikan keberlanjutan destinasi melalui kolaborasi antarstakeholder dan pelestarian lingkungan secara konsisten.

Penelitian terdahulu kelima pada *Journal Of Responsible Tourism* berjudul Penerapan *Green Tourism* dalam Pengembangan Potensi Wisata Pulau Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar (2025). Penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi konsep green tourism dalam pengembangan destinasi bahari berbasis potensi alam dan budaya lokal di Pulau Pasi Gusung. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Fokus kajian mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta peran pemangku kepentingan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Pasi Gusung memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis green tourism, terutama melalui kekayaan ekosistem mangrove, wisata bahari, serta tradisi lokal seperti *Assulo*. Namun demikian, implementasi konsep tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain permasalahan pengelolaan sampah pesisir, rendahnya kesadaran lingkungan sebagian masyarakat, serta dominasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata yang menyebabkan partisipasi masyarakat dan pokdarwis belum optimal. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha homestay, kuliner, dan jasa wisata, masih terdapat kesenjangan ekonomi antara kelompok yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata dan yang tidak.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan pengelolaan wisata, edukasi pariwisata berkelanjutan,

pengembangan ekonomi kreatif, serta penyusunan regulasi yang selaras dengan prinsip green tourism. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, konservasi lingkungan, serta perumusan kebijakan yang lebih inklusif agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa green tourism tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada vitalitas ekonomi lokal, pelestarian budaya, serta penciptaan pengalaman wisata yang bermakna. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan pengembangan destinasi berkelanjutan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi wisata.

Dapat disimpulkan penelitian-penelitian tersebut umumnya belum secara spesifik mengkaji penilaian wisatawan terhadap tata kelola wisata dan penerapan konsep green tourism serta keterkaitannya dengan kesadaran konservasi lingkungan dan partisipasi ekonomi masyarakat lokal sebagai *outcome* dari pengelolaan pariwisata. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis kebijakan, strategi pengembangan destinasi, atau peran *stakeholder*, sehingga belum banyak penelitian yang mengukur persepsi wisatawan secara kuantitatif sebagai indikator evaluasi terhadap keberhasilan implementasi green tourism di suatu destinasi wisata.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, khususnya pada konteks pengelolaan wisata Pantai Tirang di Kota Semarang, yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip *green tourism*, seperti rendahnya kesadaran konservasi lingkungan, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta belum terintegrasinya partisipasi ekonomi masyarakat lokal dalam aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kerangka kebijakan pariwisata berkelanjutan yang telah ditetapkan pemerintah dengan praktik pengelolaan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis penilaian wisatawan terhadap tata kelola wisata dalam

perspektif *green tourism* serta implikasinya terhadap kesadaran konservasi lingkungan dan partisipasi ekonomi masyarakat lokal di Pantai Tirang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami bagaimana implementasi *green tourism* tidak hanya dilihat dari perspektif kebijakan dan pengelola, tetapi juga dari persepsi wisatawan sebagai pengguna langsung destinasi wisata.

1.7 Kerang Teori

1.7.1 Paradigma Tata Kelola (*Governance*) dalam Ilmu Pemerintahan

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, konsep tata kelola (*governance*) berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan *government* yang bersifat hierarkis dan *top-down*. *Governance* menekankan bahwa penyelenggaraan urusan publik tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi melibatkan berbagai aktor non-negara seperti masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal. Menurut Rhodes (1996), *governance* merupakan pola pengelolaan yang ditandai oleh jaringan aktor yang saling bergantung (*interdependence*), di mana pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pengendali, melainkan berperan sebagai koordinator. Konsep ini relevan dalam pengelolaan pariwisata karena pariwisata melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam. Tata kelola wisata dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah, pengelola wisata, Pokdarwis, masyarakat, dan wisatawan.

1.7.1.1 *Good Governanced* Dalam Pengelolaan Wisata

Konsep *good governance* merupakan salah satu pilar utama dalam kajian Ilmu Pemerintahan. Menurut UNDP (1997), *good governance* ditandai oleh prinsip-prinsip utama, antara lain:

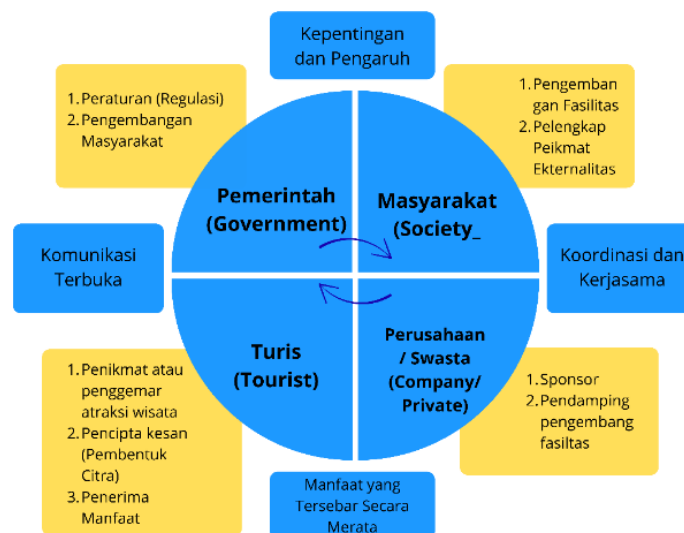
1. Partisipasi
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Efektivitas dan efisiensi
5. Supremasi hukum

6. Responsivitas

Dalam pengelolaan pariwisata, prinsip-prinsip *good governance* menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola wisata yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara masyarakat dan pelaku usaha menjadi mitra aktif dalam pengembangan wisata. Prinsip partisipasi tercermin apabila melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata, sedangkan transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam pengelolaan retribusi dan fasilitas wisata.

1.7.1.2 Collaborative Governance

Konsep *collaborative governance* dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara langsung, formal, dan konsensus-oriented. Dalam pariwisata, *collaborative governance* digunakan sebagai pengelolaan destinasi wisata membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi komunitas.



Gambar 1. 1 Model Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata

Sumber :Buku Tata Kelola Pariwisata di Daerah tahun 2020, Hal 68. (Model Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata)

Melalui gambar di atas dapat dilihat bahwa para *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan objek wisata telah melakukan berbagai bentuk pembenahan dan pengembangan sesuai dengan tingkat pengaruh serta kepentingan masing-masing. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bryson, yang menyatakan bahwa analisis peran *stakeholder* dapat dilakukan dengan mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) terhadap suatu isu. Menurut Bryson dan Hardiansyah (2012:190), analisis tersebut dilakukan melalui penyusunan matriks dua kali dua yang membagi *stakeholder* ke dalam empat kategori, yaitu *contest setters*, *players*, *subjects*, dan *crowd*. Dalam konteks ini, *interest* mengacu pada minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap pembangunan, sedangkan *power* menggambarkan kemampuan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau menetapkan kebijakan pembangunan. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis tata kelola wisata di Pantai Tirang, Semarang, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip *green tourism*.

Adanya *destination management organization* (DMO) sangat diperlukan karena sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Selain itu, DMO juga berfungsi dalam meningkatkan daya saing pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable competitiveness*) melalui integrasi antara pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian lingkungan.

1.7.1.3 Tata Kelola Pariwisata (Tourism Governance)

Tourism governance merupakan penerapan konsep *governance* dalam sektor pariwisata. Menurut Bramwell dan Lane (2011), tourism governance mencakup mekanisme, proses, dan institusi yang mengarahkan dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Tata kelola pariwisata tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, tourism governance sangat beririsan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tata kelola pariwisata Pantai Tirang dianalisis melalui indikator:

- Peran pemerintah daerah
- Koordinasi antar pemangku kepentingan
- Keterlibatan masyarakat
- Pengelolaan sumber daya alam pesisir

1.7.1.4 Peran Pemerintah Daerah Dalam Tata Kelola Pariwisata

Menurut Hermawan (2020) tata kelola destinasi atau *Destination Management Organization* (DMO) merupakan suatu sistem pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan berdasarkan prinsip, aturan, dan konsep perencanaan destinasi yang telah ditetapkan. Tata kelola destinasi yang terstruktur dan sinergis mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, serta pengendalian terhadap seluruh aspek pengelolaan destinasi. Pengelolaan ini dilakukan secara inovatif dan sistematis melalui pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi, serta melibatkan kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi, memperluas volume kunjungan wisatawan, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta mendorong peningkatan pengeluaran wisatawan yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Fungsi utama dari tata kelola destinasi atau DMO meliputi:

1. Sebagai penggerak ekonomi lokal
2. Sebagai pemasar destinasi pariwisata
3. Sebagai koordinator industri pariwisata
4. Sebagai koordinator pengelolaan destinasi
5. Sebagai penggali serta pengembang nilai keunikan lokal.

1.7.2 Manajemen Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata dilakukan berdasarkan azas manfaat, keberlanjutan, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata

serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah wisata, sebagaimana yang dijelaskan dalam kebijakan pengembangan destinasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui program *Destination Management* (DMO) bertujuan memperkuat kelembagaan destinasi wisata secara berkelanjutan (Kemenparekraf RI, 2023). Di sisi lain, pemerintah berperan sebagai pengendali dan kordinator, yakni melakukan pengawasan terhadap dampak kegiatan pariwisata serta mendorong kolaborasi antara masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam rangka mewujudkan tata kelola wisata dari perspektif pemerintahan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan sekaligus memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.

1.7.3 Green Tourism

1.7.3.1 Konsep Green Tourism

Konsep *Green Tourism* merupakan turunan langsung dari gagasan besar *Sustainable Tourism* (Pariwisata Keberlanjutan). *Sustainable Tourism* berakar pada teori Pembangunan Keberlanjutan (*Sustainable Development*) yang ditemukan oleh Komisi Brundtland dalam laporan *Our Common Future* (1987). Konsep ini menyatakan bahwa pembangunan mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Jika prinsip tersebut diterapkan dalam bidang pariwisata, maka terbentuklah konsep *Sustainable Tourism* yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan. Swartbrooke (1999) dalam bukunya *Sustainable Tourism Management*, pariwisata berkelanjutan tidak hanya fokus pada pengembangan destinasi wisata secara ekonomi, tetapi juga menekankan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Bramwell dan Lane (2000) memperkuat dengan pernyataan bahwa inti dari pariwisata berkelanjutan adalah kolaborasi multi-pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) untuk memastikan bahwa aktivitas wisata dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak sistem sosial dan ekonomi di sekitarnya.

1.7.3.2 Green Tourism Sebagai Konsep Pembangunan Keberlanjutan

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah konsep pembangunan pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan peluang generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (*“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”*) (Brundtland Report, 1987; Swarbrooke, 1999), konsep tersebut memiliki tiga pilar utama, sebagai berikut:

1. Keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*). Hal ini yang menjadi pilar untuk menjaga ekosistem, mengurangi polusi, dan melestarikan biodiversitas.
2. Keberlanjutan sosial- budaya (*social-cultural sustainability*). Hal ini menyangkut dalam menjaga identitas budaya lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*). Hal ini yang menjadi pilar untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang terutama masyarakat lokal yang berada di sekitar Pantai Tirang, Semarang.

1.7.3.3 Green Tourism Sebagai Bagian dari Sustainable Tourism

Green tourism muncul sebagai bentuk penerapan aspek *environmental sustainability* dalam konsep *sustainable tourism*. Menurut Dowling dan Fennell (2010), *green tourism* menekankan pada praktik pariwisata yang ramah lingkungan melalui efisiensi energi, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, konservasi alam, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Weaver (2012) yang menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi justru memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Suatu destinasi dapat dikategorikan sebagai *green tourism* apabila memenuhi empat dimensi utama, yaitu berbasis pada potensi alam, mendukung upaya konservasi, menjamin keberlanjutan, serta mengandung nilai pendidikan lingkungan.

1.7.3.4 Karakteristik dan Tujuan *Green Tourism*

Wardani dan Valeriani (2016) menyimpulkan bahwa *green tourism* merupakan bentuk pariwisata yang menekankan pada pengalaman edukatif dan apresiatif terhadap upaya pelestarian lingkungan, budaya, serta sumber daya destinasi secara berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap alam dan budaya lokal, sekaligus mempromosikan keberlanjutan lingkungan hidup yang lebih berkualitas di masa depan. *Green tourism* adalah sub bagian dari *sustainable tourism* yang fokusnya pada dimensi ekologis, tetapi tetap berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Menurut Juanna *et al.* 2023, menyatakan bahwa praktik ramah lingkungan hanya dapat dicapai melalui masyarakat serta dukungan kebijakan ekonomi lokal.

1.7.3.5 Keterkaitan *Green Tourism* Dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Menurut *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*, melalui program *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang mencakup 17 pilar keberlanjutan, konsep *green tourism* memiliki keterkaitan yang erat dengan SDGs karena menekankan praktik pariwisata yang ramah lingkungan, inklusif, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak, ***green tourism berkontribusi*** terhadap pencapaian ***SDG 13*** (Penanganan Perubahan Iklim) dan ***SDG 15*** (Ekosistem Daratan). Selain itu, melalui pemberdayaan masyarakat lokal, konsep ini juga mendukung ***SDG 8*** (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta ***SDG 11*** (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan). Dalam aspek sosial dan budaya, pelestarian budaya lokal serta keterlibatan aktif komunitas turut mendukung ***SDG 4*** (*Pendidikan Berkualitas*) dan ***SDG 12*** (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Oleh karena itu, inti dari SDGs adalah menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh generasi sekarang maupun mendatang. Dalam konteks

ini, green tourism menjadi sarana konkret untuk mewujudkan berbagai target *SDGs* melalui peningkatan kesadaran konservasi dan partisipasi ekonomi masyarakat lokal.

1.7.3.6 *Green Tourism* sebagai Pendekatan “Soft” dalam Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Hunter (2002), green tourism dikategorikan sebagai pendekatan yang lebih ‘soft’ dari *sustainable tourism*, karena menitikberatkan pada perubahan perilaku wisatawan, edukasi lingkungan, dan praktik konservasi berbasis komunitas, bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik. Green tourism merupakan strategi praktis dalam mencapai tujuan besar pariwisata berkelanjutan dengan cara memperkuat kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

1.7.4 Kesadaran Konservasi dalam Perspektif *Green Tourism*

Pada perspektif *green tourism*, kesadaran konservasi diartikan sebagai sikap, pemahaman, dan perilaku individu maupun kelompok dalam menjaga, melestarikan, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab demi menjaga keberlanjutan ekosistem destinasi wisata. Menurut *UNWTO* (2019), *green tourism* menekankan keseimbangan antara aktivitas wisata dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, kesadaran konservasi dalam konteks ini mencakup pemahaman bahwa keberlangsungan pariwisata bergantung pada kelestarian alam yang menjadi daya tarik utama destinasi. Sementara itu, Weaver (2006) menyebutkan bahwa pariwisata hijau mendorong pengunjung, pengelola, dan masyarakat untuk “*think and act green*”, yaitu memiliki kesadaran ekologis dan partisipasi aktif dalam upaya konservasi sumber daya. Kesadaran konservasi dalam pariwisata hijau dapat ditandai dengan:

1. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan

2. Perubahan sikap terhadap perilaku ramah lingkungan
3. Partisipasi dalam kegiatan pelestarian seperti pengelolaan sampah, penghijauan, atau perlindungan biota laut dan pesisir
4. Dukungan terhadap kebijakan wisata berkelanjutan

1.7.5 Partisipasi Ekonomi Masyarakat

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, partisipasi ekonomi masyarakat tidak dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi individual, melainkan sebagai *outcome* dari kebijakan publik dan tata kelola pariwisata yang inklusif. Partisipasi ekonomi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pariwisata berbasis *green tourism*, di mana masyarakat lokal tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang terlibat aktif serta memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

Prinsip *good governance*, khususnya partisipasi dan keadilan, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang lahir dari pengelolaan destinasi wisata. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi wisata mencerminkan adanya distribusi manfaat yang lebih adil serta mekanisme pengelolaan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Sejalan dengan itu, konsep *green tourism* menempatkan keberlanjutan ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, partisipasi ekonomi masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk keterlibatan masyarakat lokal dalam berbagai aktivitas ekonomi wisata, seperti penyediaan jasa pariwisata, pengembangan usaha kecil dan mikro, serta pemanfaatan peluang kerja yang tercipta. Partisipasi tersebut merupakan dampak dari penerapan tata kelola pariwisata berbasis *green tourism* yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan destinasi.

1.8 Operasional Konsep

Tabel 1. 2 Kerangka Teori

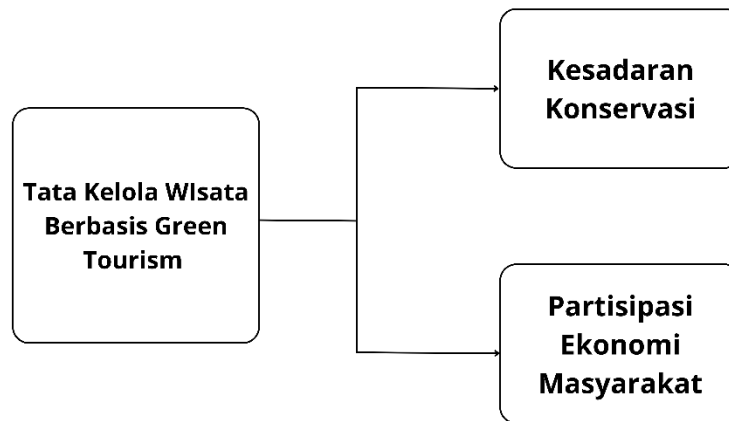
Variabel	Sub-Variabel / Dimensi	Indikator Operasional
Tata Kelola Wisata	1. Keteraturan Pengelolaan	a. Pengelolaan kawasan wisata berjalan tertib dan teratur
		b. Kejelasan aturan dan tata tertib wisata
	2. Pelayanan Pengelola	a. Sikap dan pelayanan petugas/Pokdarwis terhadap wisatawan
		b. Kemampuan petugas dalam memberikan arahan dan informasi
	3. Fasilitas Wisata	a. Ketersediaan dan kelayakan fasilitas umum (toilet, parkir, tempat sampah)
		b. Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan wisatawan
		c. Akses jalan yang memadai menuju lokasi Pantai.
	4. Transparansi Pengelolaan	a. Kesesuaian harga tiket dengan fasilitas yang diterima
		b. Kejelasan pengelolaan tiket dan parkir
<i>Green Tourism</i>	1. Wisata Ramah Lingkungan	a. Penerapan kegiatan wisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan

Variabel	Sub-Variabel / Dimensi	Indikator Operasional
		b. Upaya pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas wisata
	2. Pelestarian Lingkungan	a. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan kawasan pantai
		b. Keberadaan kawasan hijau dan kebersihan lingkungan
	3. Edukasi Lingkungan	a. Penyediaan imbauan atau informasi terkait pelestarian lingkungan
		b. Dorongan kepada wisatawan untuk menjaga kebersihan
Kesadaran Konservasi Lingkungan	1. Sikap Peduli Lingkungan	a. Kesadaran wisatawan untuk menjaga kebersihan pantai
		b. Tidak membuang sampah sembarangan
	2. Perilaku Konservatif	a. Kesiediaan wisatawan mengikuti aturan lingkungan
		b. Partisipasi wisatawan dalam menjaga kelestarian alam
Partisipasi Ekonomi Masyarakat	1. Keterlibatan Masyarakat	a. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata

Variabel	Sub-Variabel / Dimensi	Indikator Operasional
		b. Peran masyarakat sebagai pengelola, petugas, atau pelaku usaha
	2. Manfaat Ekonomi	a. Keberadaan UMKM/warung lokal di kawasan wisata
		b. Manfaat ekonomi wisata yang dirasakan masyarakat sekitar
	3. Interaksi Wisatawan–Masyarakat	a. Pelayanan masyarakat lokal kepada wisatawan
		b. Hubungan ekonomi antara wisatawan dan masyarakat lokal

(Sumber: Kerangka Teori dari Hasil Kajian yang disusun Penulis)

1.9 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 2 Kerangka Teori

(Sumber : Kerangka Teori Hasil dari Olahan Teori Penulis)

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Populasi dan Sampel

1.10.1.1 Populasi Penelitian

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2019:134), purposive sampling digunakan ketika penulis ingin memilih individu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Teknik ini sangat sesuai dalam penelitian pariwisata berbasis lingkungan karena tidak semua individu memiliki pengalaman langsung terkait pengelolaan wisata atau konservasi. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan wisata Pantai Tirang.

2. Memiliki pengetahuan mengenai kegiatan konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
3. Bersedia memberikan informasi secara mendalam dan terbuka terkait pengelolaan wisata berbasis lingkungan.

1.10.1.2 Sampel

Penentuan jumlah responden wisatawan dilakukan menggunakan rumus Slovin, yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel dengan tingkat kesalahan tertentu (*margin of error*). Rumus ini sesuai ketika populasi diketahui secara umum dan penulis ingin memperoleh hasil yang representatif. Menurut Sevilla et al. (1992) dalam Sugiyono (2019:129), rumus Slovin dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang efisien.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan

- n : Jumlah sampel
 N : Jumlah populasi
 e : Tingkat kesalahan yang ditoleransi

Tabel 1. 3 Data Pengunjung Pantai Tirang 2022-2025

Tahun	Jumlah Pengunjung
2022	2.063
2023	2.985
2024	1.555
2025	2.500

$$n = \frac{2.500}{1+2.500(0,10)^2}$$

$$n = \frac{2.500}{1+25}$$

$$n = \frac{2.500}{26}$$

n = 96,15 digenapkan 100

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk memperoleh ukuran sampel minimum yang representatif. Berdasarkan perhitungan dengan tingkat kesalahan (*error tolerance*) sebesar 10 persen, diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 96 responden, namun dalam pelaksanaannya penelitian ini digenapkan menjadi 100.

Penambahan jumlah responden tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh variasi pandangan yang lebih luas, khususnya untuk menggali penilaian, kritik, dan saran wisatawan secara lebih mendalam terhadap tata kelola dan penerapan green tourism di Pantai Tirang. Dengan jumlah responden yang lebih besar, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi wisatawan serta memperkaya temuan penelitian, baik dari aspek kuantitatif maupun deskriptif.

1.10.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif). Metode yang digunakan akan mendeskripsikan data sebagaimana yang telah diperoleh dengan pengumpulan analisis data kuantitatif untuk mengidentifikasi pola umum atau kecenderungan.

Pemilihan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Analisis Tata Kelola Wisata Berbasis *Green Tourism* di Pantai Tirang. Variabel penelitian ini adalah tata kelola wisata berbasis wisata dan berbentuk variabel tunggal. Artinya, tidak mencari pengaruh atau hubungan dengan variabel lain tetapi bermaksud mendeskripsikan tentang Tata Kelola Wisata Berbasis *Green Tourism*.

1.10.3 Teknik Pengambilan Sampel Wisatawan

Pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan memilih responden yang ditemui secara kebetulan pada saat peneliti melakukan pengumpulan data (Fauzy, 2019). Teknik ini didasarkan pada prinsip spontanitas, di mana setiap individu yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan memenuhi karakteristik yang telah ditentukan dapat dijadikan sebagai sampel (responden). Kriteria responden, sebagai berikut:

1. Wisatawan yang pernah atau sedang berkunjung ke Pantai Tirang.
2. Berusia minimal 15 Tahun.
3. Bersedia menjadi responden penelitian.
4. Mengisi kuesioner secara lengkap dan valid.
5. Memiliki gambaran maupun pemahaman dasar mengenai aktivitas wisata di Pantai Tirang.

1.10.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019:225), jenis data dalam penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber pertama di lapangan melalui observasi dan kuesioner. Data ini mencerminkan persepsi, pengalaman, dan pandangan responden terhadap tata kelola wisata berbasis *green tourism* di Pantai Tirang. Informasi diambil melalui pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan Koordinator Lapangan Pantai Tirang. Selanjutnya, untuk data kuantitatif diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pengunjung Pantai Tirang berdasarkan persentase pengunjung yang akan dihitung menggunakan rumus slovin. Menurut Sugiyono (2019:225), data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari sumber pertama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Moleong (2019) juga menyatakan bahwa data primer adalah hasil interaksi langsung antara penulis dengan informan, berupa kata-kata, Tindakan, perilaku, yang diamati dalam konteks alami. Data primer

memberikan pemahaman langsung dan kontekstual mengenai realitas sosial dan ekologis di Pantai Tirang, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap nilai dan makna di balik Tindakan sosial masyarakat setempat. Jenis data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis melakukan observasi dengan beberapa tahap dengan tanggal ataupun hari berbeda dalam tempo waktu kurang lebih 1 bulan, untuk melihat interaksi antara pengelola, pengunjung, dan masyarakat sekitar. Observasi ini juga mencakup penilaian terhadap keberadaan dan fungsi fasilitas penunjang wisata ramah lingkungan, seperti tempat sampah terpilah, papan informasi edukatif, pelayanan terhadap pengunjung, serta area konservasi. Menurut Kadarisman dan Susanti (2022), observasi lapangan penting untuk menangkap realitas sosial yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, serta membantu memahami perilaku dan pola interaksi yang mendukung atau menghambat keberlanjutan wisata berbasis lingkungan.
2. Penulis juga mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tirang. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh pandangan wisatawan terhadap kondisi fasilitas, sistem pengelolaan, serta tingkat kesadaran mereka terhadap aspek lingkungan di kawasan wisata. Data yang diperoleh melalui kuesioner ini dianalisis secara deskriptif untuk melihat persepsi umum wisatawan terhadap prinsip *green tourism* yang diterapkan di lokasi penelitian. Penggunaan kuesioner dalam penelitian pariwisata lingkungan sangat relevan karena dapat mengukur persepsi dan tingkat kepuasan wisatawan terhadap aspek keberlanjutan dan pelayanan wisata (Sugiyono, 2018).
3. Setiap kegiatan yang berlangsung di lapangan dicatat dalam bentuk *field notes* dan dokumentasi foto maupun video. Catatan lapangan ini memuat deskripsi aktivitas konservasi seperti rehabilitasi mangrove, kegiatan ekonomi lokal, serta interaksi sosial yang terjadi selama penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti empiris yang memperkuat data dari

informan, kuesioner, dan observasi, sekaligus menjadi dasar untuk analisis triangulasi data. Menurut Moleong (2019), pencatatan lapangan secara sistematis penting dalam penelitian kualitatif karena berfungsi sebagai data utama yang merekam konteks, makna, dan proses yang terjadi selama observasi berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Menurut Creswell (2016), data sekunder membantu memberikan tambahan atau memperkaya interpretasi data primer. Bungin (2017) menambahkan bahwa data sekunder dapat berupa arsip, dokumen, laporan kegiatan, publikasi media, maupun data statistik resmi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat hasil pengambilan data dari informan dan observasi, serta memberikan bukti administratif dan kuantitatif yang melengkapi data primer. Dengan demikian, kombinasi antara keduanya menciptakan triangulasi data, yang memperkuat kredibilitas penelitian sebagaimana dianjurkan oleh Yin (2018). Data sekunder penelitian ini meliputi:

- a. Dokumen resmi dan kebijakan pemerintah
 - Dokumen pengelolaan wisata
 - Data Dinas dan bidang yang terkait.
 - Data kegiatan konservasi pesisir
- b. Arsip Pokdasrwis / Pengelola Pantai Tirang
 - Struktur kelembagaan kepengurusan Pantai Tirang
 - Data pengunjung di Pantai Tirang
 - Laporan kegiatan, peserta yang melakukan penanaman mangrove di Pantai Tirang, dan data kontribusi ekonomi warga (UMKM).
- c. Sumber Literatur dan Media Sekunder
 - Artikel berita atau publikasi ilmiah seperti buku, skripsi, dan jurnal mengenai penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada

penelitian. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum, pembandingan, perbaikan, dan acuan.

- Data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

1.10.5 Data Ordinal (Jenis Data)

Menurut Sugiyono (2018), skala Likert merupakan salah satu teknik pengukuran paling umum dalam penelitian sosial dan pariwisata, karena mampu menggambarkan sikap, pendapat, serta persepsi seseorang terhadap fenomena sosial secara kuantitatif. Selain itu, menurut Hair et al. (2019), penggunaan skala Likert mempermudah proses analisis data statistik seperti analisis deskriptif, korelasi, dan regresi, karena hasilnya bersifat interval dan dapat diolah untuk menemukan hubungan antarvariabel penelitian. Penyusunan butir-butir pernyataan dalam kuesioner dilakukan melalui proses penjabaran indikator dari masing-masing variabel penelitian ke dalam bentuk pertanyaan operasional yang sederhana dan mudah dipahami oleh responden. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell (2018) yang menyatakan bahwa instrumen penelitian kuantitatif disusun secara sistematis berdasarkan kerangka teori dan konsep yang mendasarinya agar dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel.

Tabel 1. 4 Skala Likert

Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber: Skala Likert, Sugiyono (2019:144)

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber informasi, karena studi kasus memerlukan data yang kaya untuk membangun pemahaman yang mendalam terhadap suatu kasus. Yin mengungkapkan bahwa terdapat enam bentuk

pengumpulan data dalam studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi Lapangan

Menurut Yin (2018) observasi langsung membantu penulis melihat perilaku aktual, kondisi fisik, dan situasi sosial yang sedang terjadi, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari informan. Nasution (2018) menambahkan bahwa observasi langsung penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan data empiris mengenai realitas sosial yang tampak. Langkah yang dilakukan dengan menentukan fokus observasi, Menyusun lembar observasi yang memuat indikator dan waktu pengamatan, melakukan pengamatan di berbagai waktu, dan mencatat hasil observasi dalam file notes disertai dokumentasi foto, rekaman suara, maupun video.

b. Perangkat Fisik

Alat bantu atau instrument konkret yang digunakan penulis untuk mendukung proses pengumpulan data agar lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sugiyono (2019) bahwa perangkat fisik adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah dan memperkaya proses observasi maupun wawancara agar data yang diperoleh lebih objektif dan dapat diverifikasi. Yin juga menyebutkan artefak fisik dapat menjadi sumber data penting untuk memahami dimensi nyata dari fenomena sosial. Sedangkan Creswell menyebutnya sebagai research instruments berupa alat perekam, kamera, catatan lapangan, dan perangkat teknologi lain yang membantu validitas data.

Jenis dan Contoh Perangkat Fisik:

- Fasilitas wisata (papan informasi *green tourism*, tempat sampah daur ulang).
- Produk ekonomi lokal
- Foto, brosur, dan media promosi.

c. Kuesioner

Kuesioner disebarkan kepada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tirang dengan tujuan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi dan tingkat kesadaran mereka terhadap penerapan *green tourism* di kawasan tersebut. Instrumen kuesioner ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana wisatawan memahami, menilai, dan merasakan penerapan prinsip ramah lingkungan dalam kegiatan wisata yang mereka alami. Pendekatan ini penting untuk mengetahui respons wisatawan terhadap pengelolaan berbasis keberlanjutan yang diterapkan oleh pihak pengelola wisata, serta sejauh mana kesadaran konservatif telah terinternalisasi dalam perilaku wisatawan. Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert lima poin (1–5) yang merepresentasikan tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Skala ini berkisar dari nilai 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), sehingga membuat penulis memperoleh data kuantitatif yang dapat menggambarkan persepsi, sikap, dan tingkat kesadaran wisatawan secara lebih terukur. Total terdapat 34 pernyataan yang dikembangkan berdasarkan operasionalisasi konsep-konsep penelitian yang telah disusun penulis, mencakup dimensi pengelolaan wisata berbasis lingkungan, kesadaran konservasi, dan partisipasi ekonomi dalam konteks *green tourism*.

d. Dokumentasi

Menurut Yin (2018), dokumen berfungsi sebagai bukti pendukung terhadap informasi diperoleh dari informan atau observasi. Jika menurut Sugiyono (2019) menambahkan bahwa dokumentasi penting dalam penelitian kualitatif untuk memberikan “jejak historis” dan memperkuat validitas data lapangan. Dokumen yang akan diperlukan yaitu, laporan kegiatan atau laporan mengenai kegiatan konservasi yang terlaksana. Selanjutnya peraturan daerah, kebijakan, dan surat keputusan pemerintah. Publikasi media lokal mengenai kondisi atau situasi di Pantai Tirang juga sangat diperlukan seperti, artikel, brosur wisata, dan bulletin. Dokumen yang terakhir juga diperlukan dari warga seperti, program kerja, atau hasil musyawarah warga.

e. **Rekaman Arsip**

Rekaman arsip merupakan bentuk data sekunder yang tersimpan dalam sistem administrasi atau lembaga, dan dapat berupa data statistic, catatan survei, foto lama, peta, atau data digital. Menurut Yin (2018) menjelaskan bahwa arsip berguna untuk melacak data historis atau tren jangka Panjang yang tidak bisa diperoleh melalui observasi lapangan. Sementara menurut Creswell (2016), penggunaan arsip memberikan konteks temporal (waktu) yang membantu memahami perubahan fenomena sosial dalam jangka tertentu. Jenis rekaman arsip, sebagai berikut:

- Data statistik pengunjung wisata dari Dinas Pariwisata
- Data sosial ekonomi masyarakat pesisir dari BPS atau kelurahan
- Foto-foto lama kondisi Pantai Tirang

1.10.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dan variabel penelitian. Kualitas instrumen penelitian sangat menentukan keakuratan dan keandalan data yang diperoleh, sehingga penyusunan instrumen sebaiknya disesuaikan dengan indikator penelitian serta melalui proses pengujian yang memadai (Sugiyono, 2019).

1. Uji Validitas

Setiap pernyataan pada indikator kuesioner mampu merefleksikan data yang diteliti. Suatu indikator dinyatakan valid apabila butir-butir pernyataan di dalamnya benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Pengujian validitas dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- Menguji korelasi antara skor setiap item dengan total skor.
- Mengorelasikan skor masing-masing indikator dengan total skor konstruk.

Uji validitas instrumen dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan SPSS 27. Pengambilan keputusan dari uji validitas, sebagai berikut:

r hitung positif, serta r hitung > r tabel, dinyatakan valid

r hitung negatif, serta r hitung < r tabel, dinyatakan tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian memiliki konsistensi internal dalam mengukur konstruk yang sama secara berulang. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* melalui bantuan perangkat lunak SPSS. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan tingkat konsistensi yang memadai. Pada penelitian sosial, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $\geq 0,60$ masih dapat diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat Ghozali (2018) yang menyatakan bahwa instrumen dengan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 telah memenuhi kriteria reliabilitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, nilai *Cronbach's Alpha* pada instrumen penelitian ini berada di atas batas minimal yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan mampu mengukur persepsi wisatawan secara konsisten.

1.10.8 Teknik Analisis

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis interval kelas untuk menginterpretasikan nilai rata-rata (*mean*) hasil kuesioner skala *Likert*. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan persepsi responden terhadap setiap indikator penelitian, meliputi tata kelola pariwisata, penerapan *green tourism*, kesadaran konservasi, dan partisipasi ekonomi masyarakat. Penentuan interval kelas dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

I : Lebar Interval

R : Rentang (selisih antara skor tertinggi dengan skor terendah)

K : Jumlah kelas

Dalam penelitian ini, skala *Likert* yang digunakan terdiri dari 5 kategori, dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5. Dengan demikian, rentang skor (r) adalah:

$$r = 5 - 1 = 4$$

Sehingga interval kelas diperoleh sebagai berikut:

$$I = \frac{4}{5}$$

$$I = 0,8$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kriteria penilaian rata-rata (*mean*) responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1,00 – 1,80 : Sangat Tidak Baik

1,81 – 2,60 : Tidak Baik

2,61 – 3,40 : Cukup

3,41 – 4,20 : Baik

4,21 – 5,00 : Sangat Baik